

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afan Gaffar. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

Feri Amsari. 2013. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

I.G.D Palguna. 2018. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Konstitusi Press. Jakarta.

Kusnardi Muh. dan Bintang R Siragih. 1983. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. PT Gramedia. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

-----, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

-----, 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2011. *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2012. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal. 2011. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moh. Mahfud. 1999. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. LP3ES. Jakarta.

-----, 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*. Rajawali Press. Jakarta.

-----, 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positif Legislature?* Konstitusi Press. Jakarta.

Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.

-----, 2018. *Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta.

Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian hukum*. Kencana. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.



Sri Soemantri. 1982. *Hak uji Material di Indonesia*. PT Alumni. Bandung.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Artikel

Black's Law Dictionary Seventh Edition, 1999, West Group, St. Paul Minn.

Black's Law Dictionary, 1990, West Publishing Co, St. Paul.

Bambang Sutiyoso, 2010, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6.

Indra Rahmatullah, 2013, “Rejuvinasi *Sistem Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoneia,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 tersedia di www.journal.uinjkt.ac.id.

Rafael La Porta, Florenico Lopez-de-Silanes, Cristian Pop-Eleches, Andrei Shleifer, 2004, “*Judicial Checks and Balances*,” *Journal of Political Economy*, Vol. 112, No. 21 tersedia di www.scholar.harvard.edu.

Keenan D. Kmiec, 2004, “*The Origin and Current Meaning of Judicial Activism*,” *California Law Review*, Vol. 92, No. 5 tersedia di www.californialawreview.org.

Muchamad Ali Sfaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, 2017, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2.

Nilam Rahmahanjayani, 2018, “*Judicial Restraint dan Judicial Activism* dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

Pan Mohamad Faiz, 2009, “Konstitusi dan Aktivisme Yudisial,” *Kolom Opini Jurnal Nasional* tersedia di www.panmohamadfaiz.com.

Pan Mohamad Faiz, 2016, “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13. No. 2.

Radian Salman, Sukardi dan Mohammad Syaiful Aris, “*Judicial Activism or Self-Restraint: Some Insight into the Indonesian Constitutional Court*, *Jurnal Yuridika*,” Vol. 33, No. 1 tersedia di www.e-journal.unair.ac.id.

Sunarto, 2016, “Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,”
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2 tersedia di www.e-journal.undip.ac.id.

Tanto Lailam, 2014 “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21, No. 1 tersedia di www.journal.umy.ac.id.

E. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>

<https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4>

<https://definitions.uslegal.com/j/judicial-activism/> diakses

<https://news.detik.com/berita/1217553/antasari-pasrah-diberhentikan-dari-kpk>

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

